

Peran Pemerintah Kelurahan Boyolangu Dalam Melaksanakan Tradisi Puter Kayun Di Masa Pandemi Covid-19

Andika Ronggo Gumuruh¹, Andri Maulana²
PPKn, Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia^{1,2}
andikaronggo@gmail.com¹

Abstract

Traditions are part of a culture that cannot be separated because it has been attached. Currently, the people of Java are still among the groups that hold tightly to the traditions in their environment. Various local wisdom is contained in daily values, spoken literature, customary law, and traditional ceremonies and beliefs. Traditional ceremonies carried out by the *Osing Banyuwangi* community have different rituals and purposes. *Puter Kayun* is a tradition of retracing the *Osing Boyolangu* community by riding a *delman*. In 2022, the *Puter Kayun* tradition was carried out during the Pandemic Covid-19 period, where the government issued a community restriction policy. This tradition is unique, and its uniqueness attracts the attention of the community, because of that the village government *Boyolangu* has the responsibility of preserving and introducing it to its generation, in the preservation of the government must experience obstacles such as activities carried out during the Covid-19, where all community activities are carried out with strict health protocols and restrictions on activities. The object of this study is the government of *Boyolangu* village. The method used is a qualitative approach with the type of field research. The conclusion of this research is that the role of the village government in the implementation of the *Puter Kayun* tradition has carried out protection, development, and utilization. In the implementation effort, there are several obstacles that arise, namely obstacles originating from the internal village government such as financial constraints and the second obstacle is the complexity of the licensing process in the implementation of the *Puter Kayun* tradition during the Covid-19 era. In addition, the supporting factor in the implementation of this tradition is that the *Puter Kayun* tradition agenda has become a district *event* and the community is very supportive.

Keywords: *The Government's Role, Puter Kayun Tradition, Covid-19*

Abstrak

Tradisi bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan karena telah melekat. Saat ini masyarakat Jawa masih termasuk golongan yang berpegang erat pada tradisi di lingkungannya. Berbagai kearifan lokal tertuang dalam nilai-nilai keseharian, sastra tutur, hukum adat, serta upacara adat dan kepercayaan. Upacara adat yang dilakukan masyarakat *Osing Banyuwangi* memiliki ritual dan tujuan yang berbeda. *Puter Kayun* adalah tradisi napak tilas masyarakat *Osing Boyolangu* dengan beramai-ramai naik *delman*. Di tahun 2022 tradisi *Puter Kayun* dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan masyarakat. Tradisi ini unik dan keunikannya menarik perhatian masyarakat, karena hal itu pemerintah kelurahan *Boyolangu* memiliki tanggung jawab melestarikan dan mengenalkan pada generasinya, dalam pelestarian pemerintah pasti mengalami kendala seperti kegiatan dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19, di mana semua kegiatan masyarakat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan dalam kegiatan. Objek penelitian ini adalah pemerintah kelurahan *Boyolangu*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan penelitian ini, peranan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan dari tradisi *Puter Kayun* sudah melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dalam upaya pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang muncul, yaitu kendala berasal dari internal pemerintah kelurahan seperti kendala finansial dan kendala kedua adalah rumitnya proses perijinan dalam pelaksanaan tradisi *Puter Kayun* ini di masa Pandemi Covid-19. Selain itu, faktor pendukung dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu bahwa agenda tradisi *Puter Kayun* sudah menjadi *event* kabupaten dan masyarakat sangat mendukung.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Tradisi Puter Kayun, Covid-19*



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal kaya akan kebudayaan dan tradisi, Tradisi bagian dari suatu kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan karena telah melekat. Adanya tradisi akan terjadinya kesinambungan serta gotong royong dalam masyarakat. Saat ini masyarakat Jawa masih termasuk dalam golongan yang berpegang erat kepada tradisi yang ada di lingkungan sekitarnya, tradisi akan bertahan apabila tradisi tersebut sesuai dan di dalam masyarakat dijadikan acuan bagi masyarakatnya. Tradisi sendiri kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan sudah menjadi bagian atau kehidupan dari masyarakat. Funk dan Wagnalls sebagaimana dikutip Prayudha (2021) menyatakan tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Tradisi itu menggambarkan kekayaan dan keanekaragaman budaya yang senantiasa dilestarikan serta dikembangkan karena tradisi merupakan warisan atau peninggalan dari leluhur.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang khas yang terkadang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berbagai macam bentuk kearifan lokal yang tertuang baik dalam nilai-nilai keseharian, sastra tutur, hukum adat, serta dalam bentuk upacara adat dan kepercayaan. Upacara adat yang dilakukan masyarakat Osing Banyuwangi di setiap kecamatan memiliki ritual dan tujuan yang berbeda. Upacara adat di Banyuwangi tidak terlepas dari pengaruh kepercayaan mistis yang diyakini dan kesenian yang telah diwariskan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman tanaman upacara adat yang digunakan masyarakat Banyuwangi yang dikaji secara etnobotani dan filosofisnya kemudian didokumentasikan dalam ensiklopedia.

.Kelurahan Boyolangu adalah salah satu dari empat kelurahan di Kecamatan Giri. Sisi timur lingkungan ini dianggap sebagai wilayah penyangga Kota Banyuwangi, terutama yang dilewati Jalan Mawar. Kelurahan ini terdiri perkampungan, perumahan dan lahan pertanian. Berdasarkan data tahun 2015, kelurahan yang luas wilayahnya sebesar 13,28 % dari luas keseluruhan kecamatan ini, berpenduduk sejumlah 5.033 jiwa, yang terdiri dari 2.558 laki-laki dan 2.475 perempuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (RI, 2005: 2).



Masyarakat Osing Banyuwangi memiliki banyak tradisi di Bulan Syawal. Selain Seblang, Barong Ider Bumi, setiap usai lebaran ada tradisi Puter Kayun. Puter Kayun adalah tradisi napak tilas masyarakat Osing Boyolangu, Kecamatan Giri Banyuwangi dengan cara beramai-ramai naik delman. Warga setempat dahulu menjadi pusat dari kusir dokar. Sehingga, saat Puter Kayun selalu menggunakan armada dokar. Namun, belakangan, dokar mulai tersisih. Bahkan, kini hanya tinggal 10 unit. Dahulu, lebih dari 50 unit. Meski begitu, warga tetap mempertahankan tradisi menggunakan dokar. Ritual puter kayun ini sudah menjadi salah satu agenda pariwisata di Banyuwangi. Tak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan asing ikut memeriahkan tradisi ini.

Di tahun 2022 tradisi Puter Kayun ini dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19, di mana dalam masa Pandemi Covid-19, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam pembatasan kegiatan yang dilakukan masyarakat. Tradisi puter kayun merupakan salah satu dari banyaknya kekayaan budaya Indonesia yang sampai saat ini masih terjaga dan dilestarikan. Berdasarkan pustaka yang telah diketahui bahwa sudah banyak penelitian tentang tradisi puter kayun, namun belum ada peneliti yang khusus membahas tentang peran pemerintah sekitar di mana tradisi itu dilaksanakan. Tradisi ini unik dan karena keunikannya tradisi ini selalu menarik masyarakat baik dari dalam maupun luar kota Banyuwangi, karena hal tersebut pastinya pemerintah kelurahan Boyolangu memiliki tanggung jawab yang besar untuk selalu melestarikan dan mengenalkan tradisi kepada penerusnya, dalam pelestarian pemerintah terkendala seperti kegiatan dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19, di mana dalam masa pandemi semua kegiatan dilaksanakan dengan protokol yang ketat dan pembatasan masyarakat. Berdasarkan latar belakang peneliti melakukan penelitian berjudul Peran Pemerintah Kelurahan Boyolangu Dalam Melaksanakan Tradisi Puter Kayun di Masa Pandemi Covid-19.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Peran

Menurut Soekanto (2002: 243) pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Peran (role) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002: 243).



Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat (Soekanto, 2014: 219). Sedangkan, makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan, dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial (Soekanto, 2014: 212). Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulannya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

A. Aspek-aspek Peranan

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. Menurut Soekanto (2002: 243), peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di masyarakat. Peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan



- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah pemerintah kelurahan, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi pemerintah kelurahan dalam masyarakat, artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing pemerintah kelurahan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan pemerintah kelurahan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain itu, menurut Soekanto (2002: 243), pembahasan perihal peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu dilaksanakan apabila struktural masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan ini seyogyanya dilekatkan pada suatu individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak; dan
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

B. Bentuk-bentuk Peran

Biddle dan Thomas Dalam Soekanto (2002: 244), membagi peristilahan dalam teori peran maka ada empat golongan, yaitu:



1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Peneliti dapat memberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada teori peran, yang di mana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai tujuan. Di dalam peran banyak karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam rana sosial tentunya mendukung keberadaan ya. Salah satunya itu adalah peran pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah kelurahan.

2. Konsep Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri dalam Juriati 2013: 10), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk bisa mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, dalam Juriati, 2013: 10). Sedangkan, definisi lainnya menurut Muhammad Yamin, (Juriati, 2013:10) mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan aspek politik.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C. F. Strong dalam Juriati, 2013: 11). Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara-negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas atau wewenang lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini juga melingkupi semua urusan negara tersebut.



Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD bersama pembuatan PERDA. Tugas kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan daerah.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya yaitu Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan (Juriati, 2013: 14) menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah merupakan perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; sebagai filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada juga negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembang masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau, hal ini didukung filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus dalam kehidupan masyarakat, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan pandangan pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Ryas Rasyid dalam Agus (2011:12) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu:

1. Fungsi pelayanan (*public service*).
2. Fungsi pembangunan (*development*).
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*).
4. Fungsi pengaturan (*regulation*).

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*) dan fungsi perlindungan (*protection function*). Hal yang terpenting dari ketiga fungsi ini adalah pemerintah



dapat mengelola fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabilitas kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity* dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran dan fungsi pemerintah dalam konsep pendampingan sosial berubah tidak sekedar sebagai institusi pelayanan tetapi di masyarakat yang demokratis memiliki peran pokok sebagai fasilitator. Pemerintah tidak bertugas memberikan pelayanan umum saja tetapi lebih ditekankan pada upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk memutuskan pada lingkungan, kebutuhan dan tantangan ke depan. Fasilitator tidak sekedar dituntut menguasai teknik tertentu untuk memfasilitasi tetapi juga harus membangun kemampuan pelaku mengenai program secara keseluruhan.

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan pembangunan desa/kelurahan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan berjalan baik.

Keterlibatan masyarakat dengan institusi dalam perencanaan, melaksanakan sekaligus mengontrol berbagai keputusan yang telah dibuat mencerminkan bentuk komunikasi dan interaksi *stakeholders* dibangun berdasar kepercayaan. Membangun kepercayaan kepada masyarakat tidak sebatas sosialisasi strategi program saja, tetapi harus melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama. Fasilitasi dilakukan untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan.

4. Pemerintah Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteksnya, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Wewenang pemerintah kelurahan di antaranya:



- a. Pelaksana kegiatan pemerintah kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Tugas Pemerintah Kelurahan, yaitu: menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan wali kota. Fungsi Pemerintah Kelurahan, yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

III. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti, di mana penelitian kualitatif menurut definisi Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2004) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” mengatakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kanchah atau lapangan (*field research*), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau ‘in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan terkait erat dengan pengamatan berperan serta peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan di analisis dalam berbagai cara (Moleong, 2009).

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan studi terhadap suatu realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Menurut Miles dan Huberman dalam Hasan (2002), bahwa ketika akan mengadakan penelitian lapangan tugas pertama peneliti adalah menentukan gambaran masalah yang diteliti. Perbedaan orientasi



permasalahan pada sisi lain juga membedakan karakteristik jenis penelitiannya. Apabila peneliti berorientasi pada kehendak memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara mendalam penelitian lapangan yang dilakukan termasuk kategori studi kasus. Apabila orientasinya pada hajat memahami ciri kehidupan sosial suatu budaya suatu masyarakat guna menyusun deskripsi secara sistemis, penelitian lapangan yang dilakukan termasuk jenis penelitian etnografi (Hasan, dkk. 2002).

Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang di teliti, yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang di baca. Adapun landasan teori yang ditulis dalam penelitian berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang di teliti. Walaupun permasalahan tersebut bersifat sementara. Sehingga peneliti kualitatif dituntut melakukan *grounded research*, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan atau situasi sosial (Sugiono, 2009).

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, diharapkan peneliti dapat terjun langsung ke dalam objek penelitian, sehingga dapat mengetahui peran pemerintah dalam pelaksanaan tradisi Puter Kayun di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi di masa Pandemi Covid-19 secara mendalam.

3. Sumber Data

Pada penelitian, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber data primer dan sekunder, meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 1995).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dan hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan mereka. (Nasution, 2003).



Sebelum suatu penelitian dilakukan, terlebih dahulu menentukan subyek yang diteliti sekaligus mengandung pengertian berapa besar kecilnya informan yang akan diteliti. Dalam pencarian data dari informan peneliti kualitatif ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan teknik *purposive sampling* peneliti menentukan informan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan para informan yang mengetahui tentang fokus masalah yang diteliti. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan. Pertimbangan ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010).

Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Kelurahan
- b. Pegawai Kelurahan
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Tokoh Pemuda

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010).

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang relevan dengan persoalan yang dihadapi, karena kualitas data juga ditentukan oleh kualitas alat pengambilan/ pengukurannya. Oleh karena itu, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkan secara ilmiah. Dengan observasi sebagai alat pengumpul data dimaksudkan observasi yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan. Dalam observasi ini



diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang sengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya (Nasution, 1991). Adapun macam-macam observasi ada tiga macam, yaitu:

1. Observasi Partisipasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari perilaku yang tampak.

2. Observasi Terus Terang atau Samar

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data yang menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Adakalanya peneliti tidak mengatakan kepada pihak yang diteliti bahwa sedang melakukan penelitian yang akan disesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi.

3. Observasi Tak Berstruktur

Observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap., tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono, 2009).

Dalam pelaksanaan pengamatan terlibat, peneliti harus memupuk terlebih dahulu hubungan baik dan mendalam dengan informan. Adanya rasa saling mempercayai antara peneliti dengan informan. Sikap saling percaya tersebut dikenal dengan istilah *rapport*. Apabila *rapport* tersebut telah terbina, informan tidak mencurigai peneliti sebagai orang yang hendak mencelakakannya.

Pengamatan terlibat diartikan sebagai bentuk pengamatan yang dibarengi interaksi antara peneliti dengan informan. Dalam pengamatan terlibat, peneliti



hidup bersama-sama (ditengah-tengah) masyarakat yang ditelitinya. Dalam kegiatan pengamatannya si peneliti ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh pelakunya dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan agar dapat memahami dan merasakan (menginternalisasikan) kegiatan-kegiatan dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2001). Menurut Patton dalam Nasution (1988) yang dikutip oleh Sugiono, dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- b. Dengan observasi diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.
- c. Dengan observasi, peneliti melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara.
- d. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara, karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga (Sugiyono, 2010).

Adapun data-data yang dapat diperoleh dari metode observasi ini adalah Kondisi Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview merupakan komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi dilakukan dalam keadaan temu muka, namun komunikasi juga dapat dilaksanakan melalui telepon (Nasution, 1991).

Sedangkan menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009).

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode *interview* yang digunakan ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), jenis wawancara ini



sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2010).

Selanjutnya langkah-langkah wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal, yang dikutip Sugiyono adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil dari wawancara yang telah diperoleh (Sugiyono, 2010).

Adapun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara ini adalah yang mengenai informasi mengenai Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Tradisi Puter Kayun di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi di Masa Pandemi Covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009: 240). Teknik ini merupakan cara atau teknik memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto: 2006).

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan (Moleong, 2008). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih



kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan atau biografi. Tetapi perlu di cermati, bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif (Sugiyono, 2010).

Adapun langkah-langkah dalam yang ditempuh dalam menyeleksi dokumen yang dipandang sangat bernilai adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi situasi sosial di mana suatu peristiwa atau kasus memiliki makna yang sama. Situasi sosial ini mempertimbangkan waktu dan tempat di mana suatu peristiwa terjadi.
- b. Dalam hubungan dengan identifikasi, perlu dikenali kesamaan dan perbedaan, yaitu memfokuskan pada objek, suatu peristiwa atau suatu tindakan, diperlukan secara sama, orang-orang menanggapinya secara sama, pada situasi yang sama, di dalam batas-batas sosialnya.
- c. Selanjutnya mengenali relevansi teoritis atas data tersebut (Bungin, 2001).

Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan proses penyelenggaraan demokrasi, struktur organisasi, sarana prasarana, beserta data-data lainnya, seperti foto-foto yang menunjang guna kesempurnaan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif menurut Bogdan & Biken dalam Moleong (2009) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang di kelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan, dan memutuskan yang dapat diceritakan pada orang lain.

Menurut Seidel yang juga dikutip Moleong, analisa data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut.

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan, dan temuan umum (Moleong, 2009: 248).



Dalam menentukan metode analisa data yang akan digunakan adalah model Miles Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, data sajian, dan kesimpulan. Hal ini digunakan karena proses menganalisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data (Sugiyono, 2009).

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2009).

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif. Dengan sajian data, maka memudahkan memahami yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut. Selanjutnya juga disarankan, dalam melakukan proses sajian-sajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa penunjang data-data seperti gambar, grafik, tabel matriks, *network* (jejaring kerja), dan *chart* (Sugiyono, 2009).

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2009).



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk upaya pelestarian tradisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi pada Pasal 5 Ayat 2 meliputi: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide, gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak-hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau proses alam. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku dan karya buda berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku pada pemilikinya tanpa harus mengorbankan orisinalitasnya. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan peranan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tradisi Puter Kayun sudah melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Peranan pemerintah kelurahan dalam Perlindungan yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan tokoh-tokoh tersebut dalam upaya pelaksanaan tradisi Puter Kayun di masa Pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah kelurahan juga terlihat pro aktif dalam melakukan perlindungan dan pelestarian karena acara tradisi setiap tahun selalu dilaksanakan, seperti misalnya pada 2 tahun lalu ketika mengalami pandemi, tradisi ini tetap dilaksanakan namun dengan massa yang lebih sedikit. Hal ini terbukti bahwa pemerintah berperan dalam pelestarian tradisi Puter Kayun.

Peranan pemerintah kelurahan dalam Pengembangan dalam rangka pelaksanaan tradisi Puter Kayun secara umum sudah baik, sebab dapat dilihat dari sikap Pemerintah Kelurahan Boyolangu yang selalu memberikan apresiasi kepada pihak pelaksana tradisi puter kayun, kemudian setiap tahun sebelum tradisi Puter Kayun ini digelar, pihak pemerintah kelurahan mengundang tokoh masyarakat, panitia tradisi Puter Kayun untuk melakukan diskusi, sarasehan yang mana bertujuan untuk pengembangan tradisi.

Peranan pemerintah kelurahan dalam pemanfaatan tradisi Puter Kayun yaitu yang memanfaatkan tradisi ini agar bisa digunakan untuk kepentingan seperti pendidikan, sosial, agama, ekonomi, dan hal itu sudah dilakukan cukup baik, yang pertama dalam



bidang ekonomi dapat dilihat dari peranan pemerintah kelurahan sendiri yaitu salah satunya dengan cara mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat, yang kedua bidang agama tradisi ini termasuk tradisi keagamaan jadi dengan adanya pelaksanaan setiap tahun diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang ketiga dibidang sosial dengan dilaksanakan tradisi ini setiap tahun mampu mengajak masyarakat khususnya masyarakat Boyolangu agar saling berbaur. Kemudian yang ke empat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan jelas sekali dengan adanya tradisi ini berkaitan dengan sejarah dan menambah wawasan dan sebagainya.

Dalam upaya pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang muncul dalam peranan pemerintah kelurahan melestarikan tradisi Puter Kayun. kendala tersebut muncul dari dua hal yaitu kendala yang muncul berasal dari internal pemerintah kelurahan seperti kendala finansial (anggaran terbatas) dan juga kendala kedua adalah rumitnya proses perijinan dalam pelaksanaan tradisi puter kayun ini di masa Pandemi Covid-19.

Selain itu, faktor pendukung dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu bahwa agenda tradisi puter kayun sudah menjadi event kabupaten dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan tradisi ini, karena tradisi ini sudah turun-temurun dari zaman dahulu.

Gambar 1. Kegiatan Tradisi Puter Kayun



Gambar 2. Kegiatan Prosesi Ritual dalam Tradisi Puter Kayun



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan peranan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tradisi Puter Kayun sudah melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Kendala yang muncul dalam peranan pemerintah kelurahan melestarikan tradisi Puter Kayun. Kendala tersebut muncul dari dua hal yaitu kendala yang muncul berasal dari internal pemerintah kelurahan seperti kendala finansial (anggaran terbatas) dan kendala kedua adalah rumitnya proses perijinan dalam pelaksanaan tradisi Puter Kayun ini di masa Pandemi Covid-19, faktor pendukung dalam pelaksanaan tradisi ini yaitu bahwa adanya agenda tradisi Puter Kayun sudah menjadi *event* kabupaten dan juga masyarakat sangat mendukung pelaksanaan tradisi. Rekomendasi dalam penelitian ini, sekiranya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak mendukung kegiatan tradisi yang ada di masyarakat, karena kegiatan semacam ini dapat menjadi potensi wisata daerah atau lokal demi kesejahteraan masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Agus, D. (1995). *Pelayanan organisasi pelayanan publik*. Yogyakarta University Press.
- Agus. M. B, (2011). *Peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan di kelurahan Siwa kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo*. FISIP Universitas Hasanuddin Makassar.
- Albrow, M. (1989). *Birokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen penelitian edisi revisi*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2005). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*. Bina Aksara.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan mentalis dan pembangunan*. PT. Gramedia Utama.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode penelitian masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka.
- Kencana, I. (2001). *Pengantar ilmu pemerintahan*. PT. Rafika Aditama.
- Labolo, M. (2007). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas'ood, M. (1994). *Politik, birokrasi, dan pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Nurdjaman, P. (2004). *Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan umum*. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.
- Poltak S., Lijan, dkk. *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sangarimbun, M. & Sofian, E. (1987). *Metode penelitian survai*. LP3ES Yogyakarta.



- Sugiyono. (2004). *Metode penelitian administrasi edisi ke-14*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningra, G. (1998). *Membangun ekonomi rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparjo, U. (1998). *Pemerintah desa dan kelurahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifin, Pipin, dkk. *Pemerintah daerah Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

